

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Evva Rohhayati*) Fitriyah**) Nur Hidayat**)

Email: evvarohhayati@gmail.com fitriyahundip@gmail.com nhsardini@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)7465407
Faksimile (024)7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Meskipun muncul isu bahwa keinginan untuk memecah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom adalah keinginan elite lokal di eksekutif dan legislatif, masyarakat Kabupaten Banyumas terlihat cenderung setuju dengan rencana pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya penolakan yang secara signifikan menghambat rencana pemekaran dalam prosesnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Banyumas terhadap rencana pemekaran wilayah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini dijelaskan melalui indikator persepsi yaitu indikator kognitif, afektif, dan konatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas per tahun 2021 dengan batasan kriteria penduduk usia 15-59 dan sampel yang digunakan yaitu sejumlah 108 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Banyumas yang merupakan anggota sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas masih kurang memiliki pengetahuan yang baik mengenai rencana pemekaran yang ditunjukkan dengan indeks tingkat kognitif dengan interpretasi sedang. Dimana dengan pengetahuan yang kurang baik tersebut mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki persepsi positif terhadap rencana pemekaran yang ditunjukkan dengan indeks tingkat afektif dengan interpretasi tinggi. Masyarakat juga turut memberikan dukungan meskipun tidak secara aktif melainkan hanya ikut terlibat dalam proses sosialisasi.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Persepsi Masyarakat, Kabupaten Banyumas

Abstract

The Banyumas Regency expansion plan has been mandated in the regional regulation (PERDA) of Banyumas Regency No. 7 of 2009 and the long-term development plan (RPJP) of 2005-2025. Although the issue arises that the desire to divide Banyumas Regency into three autonomous regions is a form of the desire of the local elite in the executive and legislative, the people of Banyumas Regency seem to tend to agree with the expansion plan. This is shown by the absence of significant rejection that hinders the expansion plan in the process. The purpose of this research is to analyze the perception of the people of Banyumas district towards the regional expansion plan.

This research uses quantitative methods and descriptive research types. The perception of the community in this study is explained through perception indicators, namely cognitive, effective, and conative indicators. The population in this study is the entire community in Banyumas district as of 2001 with the population criteria of 15-59 years old and the sample used is a number of 108 respondents. Data collection is carried out by providing questionnaires to the people of Banyumas Regency who are members of the sample.

The results of the research show that the majority of the people of Banyumas Regency still lack good knowledge regarding expansion plans as indicated by the cognitive level index with a moderate interpretation. Where with this poor knowledge, the majority of the people of Banyumas Regency have a positive perception of the expansion plan as indicated by the affective level index with a high interpretation. The community also provides support, although not actively but only being involved in the socialization process.

Keywords: Territorial expansion, Public perception, Banyumas District.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang lebih luas menjadi salah satu perubahan mendasar pada Era Reformasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dimiliki. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, negara memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Oleh karena itu dengan tujuan agar daerah mendapatkan otoritas yang lebih luas dalam mengupayakan pembangunan dan kemakmuran daerahnya, banyak daerah-daerah di Indonesia mengusulkan untuk daerahnya dimekarkan sehingga dapat menjadi daerah otonom baru.

Adanya kecenderungan pemerintah untuk mengedepankan sentralisasi dan adanya faktor ketidakadilan menjadi alasan daerah ingin melakukan pemekaran. Ketidakadilan tersebut yaitu dimana daerah yang memiliki banyak sumber daya alam seringkali tidak bisa menikmati hasil kekayaan daerahnya

karena dimonopoli oleh pusat. Adanya kesenjangan pendapatan antara daerah dan adanya kesenjangan investasi juga menjadi alasan untuk daerah melakukan pemekaran. Tidak hanya itu, sentralisasi juga ditunjukkan dengan adanya pemusatan industri yang disebabkan adanya kebijakan investasi, birokrasi serta infrastruktur yang terpusat, serta pendapatan daerah turut dikuasai pusat.

Munculnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah turut serta memicu meningkatnya usulan pemekaran daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang berencana melakukan pemekaran wilayah. Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas sudah tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2005-2025 yang mengamanatkan untuk membagi Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom melalui pemekaran wilayah. Melalui pemekaran tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam waktu

yang lebih singkat, kualitas publik dan tata kelola dapat ditingkatkan, menaikkan daya saing daerah baik nasional maupun di tingkat daerah, serta memberikan ciri khas dari segi budaya daerah dan tradisi.

Pemekaran daerah mempunyai dua sisi yang berseberangan, positif dan negatif. Sisi positifnya, pemekaran daerah mampu mengatasi keterisolasian daerah, sedangkan sisi negatifnya, pemekaran daerah seringkali memicu konflik. Dampak positif yang ditimbulkan dari terealisasinya pemekaran masih lebih sedikit daripada biaya yang harus dikeluarkan dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Bercermin pada penelitian Duri, kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Empat Lawang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran daerah justru cenderung menunjukkan *trend* pembangunan yang lambat.

masyarakat Kabupaten Banyumas terlihat cenderung setuju dengan rencana pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya penolakan secara signifikan yang menghambat rencana pemekaran dalam prosesnya. Penolakan terhadap pemekaran sempat disampaikan oleh

delapan desa dengan alasan kekhawatiran nantinya akan berubahnya status desa menjadi pemekaran, Namun hal tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa masyarakat menganggap pemekaran sebagai suatu kebijakan yang nantinya akan memberikan dampak buruk.

Persepsi masyarakat yang cenderung menyetujui adanya pemekaran juga terlihat dari cukup seringnya agenda ini dibawa dalam arena kampanye oleh beberapa calon pemerintah Kabupaten Banyumas. Misalnya pada Pilkada 2008, tiga calon Bupati bersilaturahmi dengan Pak Tri dan tokoh-tokoh lain yang dituakan di Komite Pembentukan Banyumas Menjadi Dua Daerah Otonom (KPBD2O), untuk meminta dukungan politik dalam Pilkada serta berkonsultasi terkait proses pemekaran. Pada tahun 2018, Achmad Husein yang pada saat itu mencalonkan diri menjadi Bupati Banyumas, turut serta memasukkan rencana pemekaran wilayah menjadi salah satu janji kampanye. Pemekaran wilayah menjadi salah satu isu yang efektif dalam menarik dukungan masyarakat, hal ini dibuktikan dari terpilihnya Achmad Husein menjadi Bupati Banyumas

periode 2018-2023. Kemudian Bupati Achmad Husein mengesahkan rencana pemekaran RPJMD 2018-2023 sebagai bentuk komitmen politik kepada masyarakat selama masa kampanye Pilkada 2018.

Secara geografis, Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam kawasan selatan Jawa Tengah. Beriringan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pusat-pusat perekonomian di kawasan utara Jawa Tengah, kawasan selatan memiliki potensi yang seharusnya dapat dikembangkan. Dimulai dengan terbentuknya badan otonom yang dikenal dengan nama Barlingmascakeb, terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, Kota Purwokerto sudah lama dicanangkan untuk menjadi bagian dari pusat kawasan strategis pertumbuhan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).

pada tahun 2019 Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam kriteria daerah berkembang pesat di kawasan Barlingmascakep, Akan tetapi berdasarkan *Indeks Williamson* Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama sebagai daerah

dengan angka ketimpangan tertinggi di antara lima Kabupaten di kawasan tersebut. Adanya perbedaan pendapatan yang dihasilkan antar daerah di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bentuk ketimpangan yang terjadi setelah berlakunya daerah otonom di Indonesia. Kemampuan menghimpun pendapatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas yang cenderung berbeda-beda tersebut disebabkan oleh adanya potensi daerah yang dimiliki masing-masing kecamatan juga berbeda.

Tujuan pemekaran daerah, secara substansi adalah untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal yaitu dalam melayani masyarakat, hal ini perlu terwujud agar ekonomi daerah dapat tumbuh dengan lebih cepat yang kemudian berdampak pada terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemekaran daerah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, pada upaya pemekaran daerah di seluruh Indonesia terdapat beberapa penolakan atau paling tidak, tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat sebagai pihak yang akan menerima output kebijakan pemekaran Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat pengetahuan dan pemahaman masyarakat (kognitif) mengenai rencana pemekaran, dan bagaimana perasaan menyangkut aspek emosional (afektif) masyarakat, serta tendensi dalam menyikapi (konatif) rencana pemekaran tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas”**.

METODE PENELITIAN

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana dalam mengukur data kuantitatif digunakan suatu skala numerik (angka). Skala numerik tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi data interval dan data rasio. Dalam mengolah data

kuantitatif dapat menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik.

Dengan menggunakan rumus solvin dengan tingkat kepercayaan 99%, maka diperoleh hasil dengan jumlah responden sebanyak 99,99. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 108 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *probability sampling* atau pengambilan sampel probabilitas. Dengan menggunakan teknik *sampling area* atau *sampling daerah (cluster random sampling)*, populasi penelitian dibagi dalam tiga cluster wilayah yaitu bakal calon Kabupaten Banyumas, bakal calon Kabupaten Banyumas Barat, dan bakal calon Kota Purwokerto. Dalam penelitian ini, yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak, maka pengambilan sampel dilakukan dengan *multiple stage cluster sampling*. Untuk menentukan sampel kecamatan digunakan metode lotere (sistem undian), sedangkan untuk menentukan sampel kelurahan/desa menggunakan bantuan komputer dengan Ms. Excel. Sesuai dengan permasalahan, dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel (variabel tunggal) yaitu

persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Banyumas diukur melalui tiga indikator persepsi yaitu indikator kognitif, afektif, dan konatif.

A. Indikator Kognitif

1. Pengetahuan masyarakat tentang makna pemekaran wilayah/daerah.
2. Pengetahuan masyarakat tentang rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Pemahaman masyarakat mengenai isu yang berkembang dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
4. Ketersediaan informasi mengenai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Pengetahuan masyarakat tentang tahapan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Pengetahuan masyarakat tentang proses sosialisasi pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Pengetahuan tentang adanya penyelenggaraan musdesdus.

B. Indikator Afektif

1. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada

peningkatan pelayanan pemerintah.
2. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju.
3. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada semakin menurunnya tingkat <u>pengangguran</u> .
4. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada semakin menurunnya tingkat <u>kemiskinan</u> .
5. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada semakin menurunnya tingkat gizi buruk.
6. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah tidak menjamin adanya pemerataan pembangunan.
7. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah dapat memicu persaingan elit politik di daerah.
8. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah dapat menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di daerah-daerah di luar Kota Purwokerto.
10. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten

Banyumas dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju di daerah-daerah di luar Kota Purwokerto.
11. Pendapat masyarakat mengenai adanya potensi kesulitan dalam penataan pegawai dan munculnya konflik kepentingan dalam rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
12. Pendapat masyarakat mengenai adanya kemungkinan kesulitan pembagian aset daerah dalam rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
13. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah di calon Kabupaten Banyumas Barat dan Kabupaten Banyumas.
14. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengurangi ketimpangan antara daerah-daerah di calon Kota Purwokerto dengan daerah-daerah yang berada di wilayah calon Kabupaten Banyumas Barat dan kabupaten Banyumas.
15. Pendapat masyarakat (setuju/tidak setuju) mengenai agenda pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom.

C. Indikator Konatif

- | |
|--|
| 1. Sikap masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. |
|--|

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Kognitif (Pengetahuan Masyarakat)

Aspek kognitif berkaitan dengan komponen pengetahuan dan pemahaman individu mengenai objek yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini, aspek kognitif masyarakat terhadap pemekaran dijelaskan sebagai suatu pandangan, cara berpikir masyarakat, dan sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

Untuk dapat mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai pemekaran daerah berdasarkan tingkat kognitifnya maka interpretasi dilakukan dengan teknik analisa statistik deskriptif. Dimana skor keseluruhan tingkat persepsi masyarakat pada indikator kognitif adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Skor Seluruh Kriteria} = \frac{\text{Jumlah Skor Tiap Kriteria}}{\dots}$$

X Jumlah Responden X Instrumen Pertanyaan

Pada indikator kognitif skor paling tinggi atau skor ideal yang bisa dicapai adalah sebesar 3780, dimana skor tiap kriteria adalah sebagai berikut:

1. Tidak Tahu Sama Sekali/Sangat Tidak Paham/Sangat Tidak Cukup = $1 \times 108 \times 7 = 756$
2. Tidak Tahu/Tidak Paham/Tidak Cukup = $2 \times 108 \times 7 = 1512$
3. Kurang Tahu/Kurang Paham/Kurang Cukup = $3 \times 108 \times 7 = 2268$
4. Tahu/Paham/Cukup = $4 \times 108 \times 7 = 3024$
5. Sangat Tahu/Sangat Paham/Sangat Cukup = $5 \times 108 \times 7 = 3780$

Dengan interpretasi nilai sebagai berikut:

Tabel Interval Indikator Kognitif

Interval	Kategori
756 - 1764	Rendah
1765 - 2772	Sedang
2773 - 3780	Tinggi

Pada indikator kognitif, analisis data yang digunakan merupakan analisis

deskriptif dengan menggunakan pengukuran skala likert dimana:

Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data Tingkat Kognitif

Masyarakat = Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data/Jumlah

Skor Ideal (Tertinggi) X 100%

Dengan kriteria interpretasi rekapitulasi skor tingkat kognitif masyarakat sebagai berikut:

Tabel Interpretasi Indikator Kognitif

Interval	Kategori
20% - 46,6%	Rendah
46,7% - 73,3%	Sedang
73,4% - 100%	Tinggi

Dengan melihat data hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa terdapat tujuh item pertanyaan berdasarkan tingkat kognitifnya terhadap rencana pemekaran wilayah. Dimana untuk seluruh pernyataan memiliki indeks tingkat kognitif dengan total skor 2.509 atau sebesar 66,3% dengan interpretasi sedang. Menurut hasil penelitian, masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan mengenai isu yang berkembang dalam proses

pemekaran wilayah, tahapan-tahapan pemekaran wilayah, adanya proses sosialisasi dan musdesso yang diadakan untuk membahas mengenai persetujuan masyarakat terhadap pemekaran wilayah. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki tingkat kognitif yang sedang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai pemekaran wilayah dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyumas tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai agenda pemekaran wilayah di Kabupaten Banyumas. Kurangnya pemahaman masyarakat ini salah satunya dikarenakan kurangnya ketersediaan informasi mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Tingkat kognitif masyarakat yang masih kurang tersebut akan memengaruhi alasan-alasan mereka untuk berpihak atau tidak terhadap rencana pemekaran. Menjadi suatu persoalan jika mereka setuju maupun tidak setuju namun tidak dilandaskan dengan pengetahuan yang cukup.

B. Aspek Afektif

Aspek Afektif berkaitan dengan perasaan menyangkut aspek emosional subjektif individu terhadap objek

persepsi dan berkaitan dengan sudut pandang masyarakat terhadap baik/tidaknya maupun setuju/tidaknya dengan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

Untuk dapat mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai pemekaran daerah berdasarkan nilai afektifnya maka interpretasi dilakukan dengan teknik analisa statistik deskriptif. Skor keseluruhan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat pada indikator persepsi afektif adalah sebagai berikut:

Jumlah Skor Seluruh Kriteria =

Jumlah Skor Tiap Kriteria

**X Jumlah Responden X Instrumen
Pertanyaan**

Untuk skor tiap kriteria adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan positif pada kuesioner yaitu pernyataan nomor 1,2,3,4,5,9,10,13,14,15, memiliki skor tiap kriteria jawaban adalah sebagai berikut:
 - a. Sangat Tidak Setuju = $1 \times 108 \times 10 = 1080$
 - b. Tidak Setuju = $2 \times 108 \times 10 = 2160$

- c. Kurang Setuju = $3 \times 108 \times 10 = 3240$
- d. Setuju = $4 \times 108 \times 10 = 4320$
- e. Sangat Setuju = $5 \times 108 \times 10 = 5400$

2. Pernyataan negatif pada kuesioner yaitu pernyataan nomor 6, 7, 8, 11, 12, memiliki skor tiap kriteria jawaban adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Tidak Setuju = $5 \times 108 \times 5 = 2700$
- b. Tidak Setuju = $4 \times 108 \times 5 = 2160$
- c. Kurang Setuju = $3 \times 108 \times 5 = 1620$
- d. Setuju = $2 \times 108 \times 5 = 1080$
- e. Sangat Setuju = $1 \times 108 \times 5 = 540$

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa skor tertinggi (ideal) pada indikator afektif adalah 8100, dengan interpretasi nilai sebagai berikut:

Tabel Interpretasi Indikator Afektif

Interval	Kategori
1620 - 3780	Rendah
3781 - 5940	Sedang
5941 - 8100	Tinggi

Analisis data yang digunakan merupakan analisis deskriptif yang dianalisa dengan menggunakan pengukuran skala likert dimana:

Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data Tingkat Kognitif

Masyarakat = Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data/Jumlah

Skor Ideal (Tertinggi) X 100%

Keterangan kriteria interpretasi rekapitulasi skor tingkat afektif masyarakat:

Tabel Interpretasi Indikator Afektif

Interval	Kategori
20% - 46,6%	Rendah
46,7 % - 73,3%	Sedang
73,4% - 100%	Tinggi

Berdasarkan data hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 indikator persepsi masyarakat berdasarkan tingkat afektifnya terhadap

rencana pemekaran wilayah. Dimana untuk seluruh pernyataan memiliki indeks tingkat afektif dengan total skor 6173 atau sebesar 76,2 % dengan interpretasi tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat baik di wilayah calon Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kabupaten Banyumas setuju dengan agenda pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil pada indikator kognitif dimana pengetahuan masyarakat mengenai rencana pemekaran masih tergolong sedang maka kepositifan pendapat atau setujunya masyarakat mengenai rencana pemekaran wilayah dapat dikatakan tidak berlandaskan dengan alasan yang tepat. Persetujuan masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas tersebut cenderung disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pemekaran wilayah beserta dampak-dampak yang akan ditimbulkan terutama dampak negatif dari pemekaran wilayah tersebut.

c. Aspek Konatif

Aspek konatif berkaitan dengan tendensi atau kecenderungan untuk

bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu objek yang dipersepsi dalam hal ini aspek konatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mendukung atau tidak mendukung pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas baik secara aktif maupun pasif.

Dalam pelaksanaan perencanaan pemekaran daerah tentunya tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Dimana partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai cita-cita negara demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan sehingga demokrasi yang dibangun adalah demokrasi akar rumput (bottom up), keputusan apapun yang diambil, jika menyangkut urusan publik, keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil responden mengenai dukungan masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

Tabel Dukungan Masyarakat terhadap Rencana Pemekaran

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Mendukung	20	18,51
Mendukung	70	64,81
Kurang Mendukung	18	16,67
Tidak Mendukung	0	0
Sangat Tidak Mendukung	0	0
Jumlah	108	100

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

D. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 70 responden (64,81%) menyatakan mendukung agenda pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom, bahkan sejumlah 20 responden (18,51%) menyatakan sangat mendukung agenda tersebut. Sementara itu hanya 18 responden (16,67%) menyatakan kurang mendukung, tidak ada responden yang tidak dan sangat tidak mendukung agenda pemekaran wilayah tersebut. Pertanyaan ini mendapatkan mayoritas jawaban mendukung dengan nilai mean yang diperoleh dari 108 responden yaitu sebesar 4,01. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendukung agenda pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Purwokerto.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas yang dilakukan dengan penyebaran angket kepada 108 responden, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki persepsi positif terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Adapun interpretasi dari data hasil penelitian pada tiga indikator yang digunakan yaitu indikator kognitif, afektif, dan konatif adalah sebagai berikut:

1. Indikator persepsi kognitif pada penelitian ini digunakan untuk menilai tingkat kognitif atau pengetahuan masyarakat mengenai pemekaran wilayah. Dimana tingkat pengetahuan masyarakat dijabarkan melalui pengetahuan masyarakat mengenai makna pemekaran, rencana pemekaran Kabupaten Banyumas, pemahaman mengenai isu-isu yang berkembang, adanya ketersediaan informasi, pengetahuan mengenai tahap-tahap pemekaran, proses sosialisasi, dan dilaksanakannya musdesus. Dari

hasil data penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas kurang memiliki pengetahuan yang baik mengenai rencana pemekaran.

2. Indikator persepsi afektif pada penelitian ini digunakan untuk menilai perasaan masyarakat yang menyangkut aspek emosional mengenai dampak pemekaran, baik dampak positif maupun negatif. Dimana dari hasil data dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas setuju dengan agenda pemekaran wilayah tersebut yang berarti masyarakat menganggap bahwa terbentuknya daerah otonomi baru nantinya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun dengan fakta bahwa masyarakat Kabupaten Banyumas masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai rencana pemekaran maka persetujuan mereka tersebut masih diragukan, apakah benar masyarakat setuju karena mereka benar-benar merasa bahwa pemekaran akan memberikan banyak dampak positif atau mereka justru setuju karena masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya

pemekaran daerah akan menimbulkan banyak dampak negatif.

3. Indikator persepsi kognitif digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat mendukung pemekaran wilayah baik secara aktif maupun pasif. Dimana dari hasil data penelitian, satu pernyataan indikator kognitif mendapat mayoritas jawaban mendukung dengan nilai mean yang diperoleh dari 108 responden yaitu sebesar 4,01 dengan interpretasi mendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa selain menyetujui rencana pemekaran tersebut, masyarakat juga turut memberikan dukungan meskipun tidak secara aktif melainkan hanya dalam bentuk keterlibatannya dalam proses sosialisasi yaitu dengan tidak menolak rencana tersebut.

SARAN PENELITIAN

Tujuan utama dari pemekaran dan pembentukan daerah otonomi untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, kehidupan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas sudah

melewati proses yang cukup panjang, dimana pada tahun 2021 rencana ini sudah di usulkan ke tingkat provinsi Jawa Tengah dengan memenuhi segala persyaratan pemekaran wilayah. Meskipun demikian, rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemekaran wilayah tampaknya masih belum dapat terealisasi dalam waktu dekat, pasalnya sudah tiga tahun sejak diusulkannya rencana ini di tingkat provinsi, pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas tersebut tidak kunjung dibahas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil kajian Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banyumas sudah lebih dari siap untuk dimekarkan menjadi tiga daerah otonom. Dari sisi masyarakat, dimana dalam penelitian Persepsi Masyarakat dalam Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas ini, masyarakat turut menunjukan persetujuannya terhadap rencana pemekaran wilayah. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu syarat administrasi pemekaran yaitu adanya persetujuan dari DPRD hendaknya

segera membahas mengenai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

Sementara itu adapun saran-saran bagi penelitian selanjutnya untuk lingkup topik yang sama yaitu pemekaran khususnya pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk peneliti selanjutnya bisa melengkapi penelitian ini dengan meneliti alasan DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan moratorium terhadap usulan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Mengingat Pak Ganjar, selaku pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah seringkali menggaungkan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas, dalam artian beliau setuju akan usulan tersebut. Oleh karena itu, akan menarik jika penelitian mengenai moratorium tersebut dilakukan dengan melihat lingkup dinamika politik yang terjadi di tataran pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Administrator. (2017). Letak Geografis. Diambil 22 Mei 2022, dari www.banyumaskab.go.id
website:<https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letakgeografis#:~:text=Wilayah%20Kabupaten%20Banyumas%20terletak%20di,di%20b>

- elahan%20selatan%20garis%20kh
atulistiwa.
- Adriani, N. (2021). *Pemenuhan Pangan Lokal sebagai Kebutuhan Gizi Bayi dan Balita Umur 6 -24 Bulan di Kabupaten Banyumas*. Universitas Harapan Bangsa.
- Akbar, R. F. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus. *EDUKASIA : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 55.
<https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>
- Amin, V. J. (2019). *Dinamika Politik Dalam Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bayu, D. (2022). Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia Capai 8,69 Tahun pada 2022. Diambil 23 Mei 2023, dari dataindonesia.id website: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ratarata-lama-sekolah-di-indonesia-capai-869-tahun-pada-2022>.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2022). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2022. Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas.
- DJPK, P. (2015). Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Diambil 3 September 2023, dari [Djk.kemenkeu.go.id](https://djk.kemenkeu.go.id) website: <https://djk.kemenkeu.go.id/?p=406>.
- Duri, R. (2019). *Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Gayatri, D. (2004). Mendesain Instrumen Pengukuran Sikap. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 8(2), 77.
<https://doi.org/10.7454/jki.v8i2.151>
- Giani. (2021). Korupsi Subur di Daerah Pemekaran. Diambil 10 Agustus 2023, dari www.kompas.id website:<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/05/31/korupsi-subur-di-daerah-pemekaran>.

- Gosling, J. J. (2004). *Understanding, Informing, and Appraising Public Policy*. New York: Pearson Longman.
- Halim, B., Kushandadjani, & Abdurahman. (2015). *Analisis Dinamika Politik Dibalik Tuntutan Pemekaran Cilacap Barat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, M. F. N. (2022). Rencana Pemekaran Banyumas Masih Terganjil Moratorium Pemerintah. Diambil 17 Juli 2022, dari semarang.bisnis.com
 website:<https://semarang.bisnis.com/read/20220618/535/1544916/rencana-pemekaran-banyumas-masih-terganjal-moratorium-pemerintah>.
- Islamy, M. I. (2016). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Hasil Utama Riskesdes 2018. Diambil 1 Agustus 2023, dari kesmas.kemkes.go.id
 website:https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011). Desartada, Parameter Untuk Melakukan Penataan Daerah. Diambil 11 Agustus 2023, dari www.setneg.go.id
 website:https://www.setneg.go.id/baca/index/desartada_parameter_untuk_melakukan_penataan_daerah.
- Mubyarto. (2001). *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia: Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Murtasima, D. (2019). Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah. Diambil 26 Agustus 2022, dari www.scribd.com
 website:
<https://www.scribd.com/document/431450398/pkj-pemekaran-pdf>.
- Nashrullah, N. (2022). Kemendagri: Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas Masih Diproses. Diambil 22 Mei 2022, dari news.republika.co.id
 website:<https://news.republika.co.id/berita/r5qu0i320/kemendagri-usulan-pemekaran-kabupaten-banyumas-masih-diproses>.

- Nugroho, S., & Suprpto. (2007). *Dinamika Potensi Daerah Purwokerto (Analisis Kesiapan Menjadi Kota Purwokerto)*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Oktafiani, P. (2009). *Policy Community di Daerah (Studi Kasus Tentang Proses Pengajuan Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas)*. Yogyakarta: UGM.
- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 4(1), 24.
- Pemprov Jateng. (2018). Laporan Riskesdes Jateng. Diambil 1 Agustus 2023, dari dinkesjatengprov.go.id
[website:https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2019/12/CETA-K-LAPORAN-RISKESDAS-JATENG-2018-ACC-PIMRED.pdf](https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2019/12/CETA-K-LAPORAN-RISKESDAS-JATENG-2018-ACC-PIMRED.pdf)
- Radar Banyumas. (2018). Warga Banyumas Dukung Pemekaran. Diambil 22 Mei 2023, dari radarbanyumas.disway.id
[website:https://radarbanyumas.disway.id/read/13998/warga-banyumas-dukung-pemekaran](https://radarbanyumas.disway.id/read/13998/warga-banyumas-dukung-pemekaran)
- Ridio, M. (2022). Pemekaran Banyumas, 8 Desa Menolak Masuk Wilayah Pemkot Purwokerto. Diambil 22 Mei 2022, dari www.liputan6.com
[website:https://www.liputan6.com/regional/read/4150558/pemekaran-banyumas-8-desa-menolak-masuk-wilayah-pemkot-purwokerto](https://www.liputan6.com/regional/read/4150558/pemekaran-banyumas-8-desa-menolak-masuk-wilayah-pemkot-purwokerto)
- Sejati, P. P. (2020). Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom Sampai Tahap Sosialisasi. Diambil 22 Mei 2022, dari jateng.tribunnews.com
[website:https://jateng.tribunnews.com/2020/10/20/rencana-pemekaran-wilayah-kabupaten-banyumas-menjadi-tiga-d](https://jateng.tribunnews.com/2020/10/20/rencana-pemekaran-wilayah-kabupaten-banyumas-menjadi-tiga-d)
- Suara Merdeka. (2019). Banyumas-Purwokerto Kembali Diusulkan Dipisah. Diambil 22 Mei 2022, dari www.suaramerdeka.com
- Sudantoko, D. (2003). *Dilema Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Trisnawati, A. (2015). *Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Widiyatno, E. (2020). Pemekaran Banyumas Diusulkan Jadi Tiga Daerah Otonom. Diambil 9 Maret 2020, dari news.republika.co.id

website:<https://news.republika.co.id/berita/q5uf55284/pemekaran-banyumas-diusulkan-jadi-tiga-daerah-otonom>.

Zain, F. M. (2020). Kabupaten Banyumas Akan Dimekarkan Jadi 3 Daerah Otonom. Diambil 26 Agustus 2022, dari regional.kompas.com

website:<https://regional.kompas.com/read/2020/10/21/14305771/kabupaten-banyumas-akan-dimekarkan-jadi-3-daerah-otonom>.